



The Influence of Accountability, Transparency, and Oversight on Regional Financial Management (an Empirical Study of The Manado City Government)

Berlianta Br Ginting^{1*}, Jantje J. Tinangon², Wulan D. Kindangen³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Berlianta Br Ginting
berliantaginting064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Accountability, Transparency, Supervision, Regional Financial Management

Received : 20, January

Revised : 22, March

Accepted: 24, May

©2026 Br Ginting, J. Tinangon, D. Kindangen: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Regional financial management is a crucial component to realize effective, transparent, and accountable governance. The purpose of the study is to analyze the influence of accountability, transparency, and supervision on regional financial management in the Manado City Government. With a quantitative approach and survey methods through questionnaires to 55 respondents from BKAD, BAPENDA, and BAPELITBANG, hypothesis testing used multiple linear analysis. The results of the study explained that accountability had no significant effect on regional financial management (t-count = 0.708, significance = 0.482 > 0.05). On the other hand, transparency had a positive and significant effect (t-count = 3.116, significance = 0.003 < 0.05), Supervision also had a positive and significant effect as the most dominant variable (t-count = 3.599, significance = 0.001 < 0.05). Simultaneously, the three variables explain 47.6% of the variation in regional financial management ($R^2 = 0.476$).

The Influence of Accountability, Transparency, and Oversight on Regional Financial Management (an Empirical Study of The Manado City Government)

Berlianta Br Ginting^{1*}, Jantje J. Tinangon², Wulan D. Kindangen³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Berlianta Br Ginting

berliantaginting064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Received : 20, Januari

Revised : 22, Maret

Accepted: 24, Mei

©2026 Br Ginting, J. Tinangon, D. Kindangen: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah adalah komponen krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Manado. Dengan pendekatan kuantitatif serta metode survei melalui kuesioner kepada 55 responden dari BKAD, BAPENDA, dan BAPELITBANG, pengujian hipotesis menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah ($t\text{-hitung} = 0.708$, signifikansi = $0.482 > 0.05$). Sebaliknya, transparansi berpengaruh positif dan signifikan ($t\text{-hitung} = 3.116$, signifikansi = $0.003 < 0.05$), Pengawasan juga berpengaruh positif dan signifikan sebagai variabel paling dominan ($t\text{-hitung} = 3.599$, signifikansi = $0.001 < 0.05$). Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan 47,6% variasi pengelolaan keuangan daerah ($R^2 = 0.476$).

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara adalah aspek yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di era globalisasi, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah juga cukup krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan pencegahan terjadinya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efisien dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara pengelolaan yang tidak efektif dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dan ketimpangan dalam pembangunan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menegaskan *goodgovernance* merupakan fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan berorientasi terhadap kinerja .

Meskipun demikian, penyimpangan dalam tata kelola keuangan daerah masih banyak ditemukan. Karena disebabkan oleh lemahnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada ketiga pilar utama tata kelola pemerintahan, yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan. Kelemahan ketiga pilar ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan menemukan celah untuk terjadinya praktik KKN.

Akuntabilitas menjadi pilar utama yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk memberikan laporan yang jelas, tepat waktu, atas setiap penggunaan anggaran. Penelitian oleh Oktari et al. (2024) di Kota Jambi menemukan jika akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penerapan akuntabilitas terhadap publik merupakan suatu keharusan mengingat pelaksanaan akuntabilitas yang efektif mampu mendorong peningkatan transparansi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi anggaran dan keuangan.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan daerah transparansi sangat penting dalam pencegahan terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan anggaran. Hahnussa (2019:215) menyatakan transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam integrasi akuntansi, adanya metode akuntansi yang terintegrasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses tentang keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memiliki peran strategis dalam memastikan akurasi dan keterbukaan laporan keuangan daerah. Menurut Setyaningrum (2017) dan didukung penelitian Sriwijayanti (2021), peningkatan transparansi terbukti efektif dalam meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberadaan transparansi menambah kepercayaan masyarakat untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan.

Akuntabilitas dan transparansi saja tidak cukup tanpa adanya pilar ketiga yaitu pengawasan. Adanya Pengawasan menjadikan kebijakan dan kegiatan dilaksanakan seturut peraturan yang berlaku, mencegah penyimpangan, dan memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan. Amin et al. (2022) mendapatkan bahwa pengawasan merupakan faktor paling menonjol pada peningkatan kinerja anggaran di Provinsi Sulawesi Barat. Temuan ini menunjukkan tanpa pengawasan yang kuat, akuntabilitas dan transparansi belum tentu efektif.

Meskipun berbagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi ketiga hal tersebut di beberapa instansi pemerintah di Kota Manado. Temuan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memberikan gambaran konkret mengenai celah dalam praktik tata kelola keuangan di Pemerintahan Kota Manado. Meskipun laporan keuangan pemerintah Kota Manado memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) penganggaran tahun 2023, BPK juga mendapatkan kelemahan signifikan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan adanya penyimpangan mengenai peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2023.

Analisis temuan BPK menunjukkan adanya kelemahan pada tiga pilar utama *good governance*. Pertama, penganggaran yang tidak tertib mengindikasikan rendahnya akuntabilitas, di mana proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran belum berjalan dengan baik. Kedua, pengelolaan pajak yang tidak tertib mencerminkan kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan pelaporan pendapatan, serta lemahnya sistem pengawasan. Ketiga, pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) yang tidak optimal menunjukkan celah pada efektivitas kinerja, karena investasi pemerintah belum mampu memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan. Dengan demikian, permasalahan ini secara keseluruhan mengungkapkan adanya tantangan dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik pada tingkat daerah.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025 dengan fokus pada beberapa instansi kunci di Pemerintahan Kota Manado yang secara langsung memiliki peran atau pun tidak langsung berperan kepada pengelolaan keuangan daerah. Instansi-instansi tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPRIDA) yang memiliki peran krusial dalam tahap perencanaan anggaran, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berfungsi sentral dalam aspek perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Pemilihan waktu dan lokasi ini didasarkan pada temuan BPK yang relevan dengan periode anggaran sebelumnya, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pada instansi-instansi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori keagenan disuarakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengartikan hubungan antara *principal* (masyarakat/pemilik sumber daya) dan *agent* (pemerintah sebagai pengelola sumber daya). Permasalahan keagenan (*agency problem*) muncul karena adanya asimetris informasi, di mana pemerintah sebagai *agent* memiliki akses dan penguasaan informasi lebih banyak dibanding masyarakat sebagai *principal*. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan mandat sesuai kepentingan publik (Halim, 2022:15). Untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi antara agent dan principal, diperlukan pengendalian yang efektif.

Dalam konteks pemerintahan daerah, mekanisme tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pengawasan. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara jujur, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Transparansi memastikan bahwa informasi keuangan tersedia dan dapat di akses masyarakat sehingga asimetris informasi dapat diminimalkan. Sementara itu, pengawasan baik yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat maupun eksternal oleh BPK dan masyarakat berperan penting dalam mencegah penyimpangan serta menjamin pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Good Governance

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), Good Governance merupakan proses pengelolaan kekuasaan dalam mengadministrasikan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Di Indonesia, prinsip good governance diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan UNDP (1997), Terdapat delapan prinsip utama good governance, yaitu: partisipasi masyarakat, rule of law (kepastian hukum), transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Akuntansi

Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang melakukan identifikasi, pencatatan, serta mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan (Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. 2015:3). Mardiasmo (2018:3) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan, tujuan akuntansi mengarah ke suatu hasil tertentu dan harus memiliki manfaat. Dalam proses akuntansi, laporan keuangan yang di hasilkan harus berkualitas, yang berarti relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan menunjukkan pertanggung jawaban entitas pelaporan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), guna memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan relevan untuk pengambilan keputusan publik. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013, akuntansi pemerintahan digunakan oleh entitas pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyatakan, Pengelolaan Keuangan Daerah ialah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Beberapa tahapam utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanak berdasarkan ketentuan PP No. 12 tahun 2019, meliputi:

1. Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah.
2. Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah.
3. Penatausahaan Keuangan Daerah.
4. Pelaporan Keuangan Daerah.
5. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018 : 27), akuntabilitas sektor publik mengacu pada kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, baik kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan salah satu asas pengelolaan keuangan daerah iyalah akuntabilitas yang berarti dapat dipertanggungjawabkan secara logis serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas publik membuat lima faktor utama wajib dipenuhi oleh setiap organisasi pemerintah sehingga pengelolaan sumber daya publik dapat dilaksanakan secara efektif serta dipertanggungjawabkan kepada publik antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran.
2. Akuntabilitas manajerial.
3. Akuntabilitas program.
4. Akuntabilitas kebijakan.
5. Akuntabilitas finansial.

Transparansi

Secara umum transparansi merupakan keterbukaan terhadap sesuatu yang dilakukan, adanya sifat terbuka terhadap pengawasan yang dilakukan. Sehingga pemerintah memberikan informasi yang dapat dijangkau masyarakat terhadap pengelolaan publik. Transparansi adalah kaidah dasar yang memastikan akses dan kebebasan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ini mencakup informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut (Sari & Prabowo, 2021; Wibowo, 2022). Amelia dan Hidajat (2025) menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin besar pula peluang tercapainya kinerja keuangan yang optimal.

Pengawasan

Dalam PP No. 12 Tahun 2017 mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. manfaat pengawasan juga termasuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban.

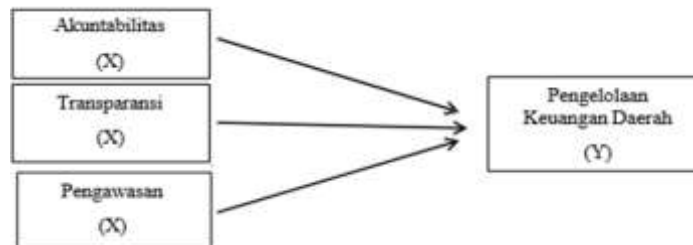
tujuan pengawasan meliputi:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
4. peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik.

Kajian Penelitian Terdahulu

1.	Lamtiur Lidia Gultom (2024). Judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat). Hasil penelitian Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa hubungan dari kedua variabel x dan y memiliki hubungan yang positif. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dan Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat
2.	Zulia Rifida Daulay (2024). Judul penelitian Pengaruh <i>Value For Money</i> , Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Banubara). Hasil penelitian Pada penelitian tersebut disimpulkan variabel yang paling berpengaruh adalah akuntabilitas dengan angka signifikan 0,000 ($<0,005$), transparansi dan pengawasan juga berpengaruh sedangkan <i>value for money</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
3.	Mana Amelia Rosyanti Riberu, Nur Fadrih Asyik (2023). Judul penelitian Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian dari penelitian ini menjelaskan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

H1: Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

H2: Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

H3: Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kota Manado yaitu: BKAD Kota Manado, BAPENDA, BAPPRIDA. Waktu penelitian ini diperkirakan dari bulan Mei 2025 - selesai,

yang digunakan untuk tahap persiapan, pengumpulan data, olah data dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang ada pada instansi Pemerintah Kota Manado yaitu BAPENDA, BAPPRIDA dan BKAD yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah secara langsung maupun tidak langsung di Pemerintahan Kota Manado dengan total 183 orang.

Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria- kriteria tertentu dalam tabel di bawah.

Tabel 2. Populasi dan Sampel

No.	Kriteria Responden	Jumlah
1.	Kepala bidang	14
2.	Kepala sub bidang / sub bagian	16
3.	Pejabat struktural terkait keuangan / aset	25
Jumlah		55

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan data primer, data dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kuesioner. Perolehan data primer pada penelitian ini langsung dari pegawai yang di jadikan responden, data sekunder di ambil dari dokumen resmi BKAD, BAPENDA dan BAPPRIDA.

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian teknik data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari setiap variabel. Kuesioner dirancang dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menerapkan skala likert untuk mengukur tingkat kesetujuan responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Skala likert yang dipakai memiliki rentang nilai antara 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner akan disebarkan secara langsung maupun online kepada pegawai.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. Skala Pengukuran

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, termasuk uang negara, yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan (Nasution 2022).	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas hukum - Akuntabilitas manajerial - Akuntabilitas program - Akuntabilitas kebijakan - Akuntabilitas finansial 	Ordinal (Skala likert 1-5)
Transparansi (X2)	kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Aksibilitas informasi - Ketersediaan informasi - Kejelasan informasi - Partisipasi dan reponsivitas 	Ordinal (Skala likert 1-5)
Pengawasan (X3)	Pengawasan merupakan suatu tindakan pengamatan yang dilakukan untuk melihat sesuatu yang sedang dikerjakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas pengawasan Internal - Efektivitas pengawasan eksternal - Penerapan SPIP - Mekanisme pengaduan 	Ordinal (Skala likert 1-5)
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dilakukan pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi anggaran - Efektivitas program/kegiatan - Kepatuhan regulasi - Kualitas laporan keuangan - Pencegahan dan penanganan penyimpangan 	Ordinal (Skala likert 1-5)

Uji Validitas dan Reabilitas

Suatu koefisien dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan apa yang ingin diukur (Ghozali, 2026). Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner yang digunakan memiliki sifat valid dan reliabel. Teknik uji validitas meliputi validitas konstruk dan uji reliabilitas koefisien Cronbach alpha.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap variabel dependen, yaitu pengelolaan keuangan daerah terdistribusi normal atau tidak (Mardiatmoko, 2020). Dengan cara pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

b. Uji Multikoleniaritas

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi, karena multikoleniaritas dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi. Cara pengujian multikoleniaritas ini adalah dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini merupakan pengujian untuk mencatat perbedaan varian dari residual antara satu observasi dan observasi yang lain pada model regresi. Untuk melakukan pengujian ini dapat memakai uji Glejser dan analisis grafik scatterplot.

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linier berganda dimanfaatkan peneliti untuk menilai sejauh mana variabel independen memberikan dampak terhadap variabel dependen, baik secara bersamaan (simultan) maupun secara individu (parsial). Proses pengelolaan data penelitian dilakukan melalui dukungan program aplikasi statistik SPSS.

Persamaan regresi pengaruh pada Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Pengelolaan Keuangan Daerah.

B : Konstanta.

X1: Akuntabilitas.

X2: Transparansi.

X3: Pengawasan.

E : Error term.

Uji Parsial (Uji T)

Menguji apakah setiap variabel independen secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Proses pengambilan keputusan yaitu perbandingan nilai thitung dengan ttabel atau melihat nilai signifikansi (p-value). Untuk mendapatkan ttabel dengan $df = (n-k-1)$, dengan $\alpha = 5\%$ atau 0,05.

Uji Simultan (Uji F)

Menguji keseluruhan variabel independen apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel atau melihat nilai signifikansi (p-value).

Koefisien Determinasi

ialah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi berapa besar variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan) dapat memberikan gambaran variasi pada variabel dependen (pengelolaan keuangan daerah) dalam model regresi linier berganda. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, semakin mendekati 1, semakin tinggi proporsi variasi pengelolaan keuangan daerah yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Uji ini dilakukan mengetahui sejauh mana instrumen atau kuesioner penelitian mampu mengukur variabel yang akan diteliti.

Tabel 4. Statistik Validitas Akuntabilitas

No.	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0.630	0.2656	Valid
X1.2	0.581	0.2656	Valid
X1.3	0.725	0.2656	Valid
X1.4	0.565	0.2656	Valid
X1.5	0.740	0.2656	Valid

Akuntabilitas (X1)

Hasil analisis nilai korelasi pada tabel akuntabilitas maka dapat disimpulkan hasil nilai rtabel pada tabel statistik adalah $N=55$ $df = 55-2 = 53$. Dengan demikian nilai rtabel yang didapat dengan signifikansi 0,05 adalah $rtabel = 0.2656$. berdasarkan pengujian validitas, keseluruhan item pernyataan pada variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai rhitung $>$ rtabel dimana item X1.1 memiliki nilai rhitung 0.630, item X1.2 0.581. item X1.3 0.725, item X1.4 0.565 dan item X1.5 0.740. Sesuai dengan pengambilan keputusan bila rhitung $>$ rtabel maka pertanyaan dikatakan valid, maka dapat dilihat bahwa seluruh item instrumen data pada variabel akuntabilitas valid.

Transparansi (X2)

Tabel 5. Statistik Validitas Transparansi

No.	R hitung	R tabel	Keterangan
X2.1	0.776	0.2656	Valid
X2.2	0.800	0.2656	Valid
X2.3	0.709	0.2656	Valid
X2.4	0.706	0.2656	Valid
X2.5	0.762	0.2656	Valid

Temuan hasil analisis nilai korelasi pada tabel transparansi maka dapat disimpulkan hasil nilai rtabel pada tabel statistik adalah $N=55$ $df = 55-2 = 53$. Dengan demikian, nilai rtabel yang didapat dengan signifikasnsi 0,05 adalah $rtabel = 0.2656$. pengujian validitas di atas, seluruh item pernyataan pada variabel transparansi (X2) memiliki nilai rhitung $>$ rtabel dimana item X2.1 memiliki nilai rhitung 0.776, item X2.2 0.800. item X2.3 0.709, item X2.4 0.706 dan item X2.5 0.762. Sesuai dengan pengambilan keputusan bila rhitung $>$ rtabel maka pertanyaan dikatakan valid, maka dapat dilihat bahwa seluruh item instrumen data pada variabel transparansi valid.

Pengawasan (X3)

Tabel 6. Statistik Validitas Pengawasan (X3)

No.	R hitung	R tabel	Keterangan
X3.1	0.573	0.2656	Valid
X3.2	0.687	0.2656	Valid
X3.3	0.636	0.2656	Valid
X3.4	0.733	0.2656	Valid
X3.5	0.712	0.2656	Valid

Berdasarkan analisis nilai korelasi pada tabel pengawasan maka dapat disimpulkan hasil nilai rtabel pada tabel statistik adalah $N=55$ $df = 55-2 = 53$. Dengan demikian, nilai rtabel yang didapat dengan signifikansi 0,05 adalah $rtabel = 0.2656$. pengujian validitas di atas, keseluruhan item pernyataan pada variabel pengawasan (X3) memiliki nilai rhitung $>$ rtabel dimana item X3.1 memiliki nilai rhitung 0.573, item X3.2 0.687. item X3.3 0.636, item X3.4 0.733 dan item X3.5 0.712. Sesuai dengan pengambilan keputusan bila rhitung $>$ rtabel maka pertanyaan dikatakan valid, maka dapat dilihat bahwa seluruh item instrumen data pada variabel pengawasan valid.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Tabel 7. Statistik Validitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

No.	R hitung	R tabel	Keterangan
Y1.1	0.808	0.2656	Valid
Y1.2	0.830	0.2656	Valid
Y1.3	0.766	0.2656	Valid
Y1.4	0.713	0.2656	Valid
Y1.5	0.840	0.2656	Valid

Hasil temuan analisis nilai korelasi pada tabel maka dapat disimpulkan hasil nilai rtabel pada tabel statistik adalah $N=55$ $df = 55-2 = 53$. Dengan demikian, nilai rtabel yang didapat dengan signifikansi 0,05 adalah $rtabel = 0.2656$. pengujian validitas di atas,keseluruhan item pernyataan pada variabel pengelolaan keuangan daerah (Y) memiliki nilai rhitung > rtabel dimana item Y1.1 memiliki nilai rhitung 0.808, item Y1.2 0.830. item Y1.3 0.766, item Y1.4 0.713 dan item Y1.5 0.840. Sesuai dengan pengambilan keputusan bila rhitung > rtabel maka pertanyaan dikatakan valid, maka dapat dilihat bahwa seluruh item instrumen data pada variabel pengelolaan keuangan daerah valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan memastikan jika kuesioner yang digunakan valid seharusnya diukur dan reliabel.

Hasil dari uji reliabilitas dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	R tabel	Keterangan
Akuntabilitas	0.652	0.60	Reliabel
Transparansi	0.801	0.60	Reliabel
Pengawasan	0.691	0.60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	0.844	0.60	Reliabel

Dari pengujian pada tabel tersebut maka dapat simpulkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari setiap variabel lebih besar dari nilai rtabel. Dapat dilihat dari hasil uji reabilitas variabel akuntabilitas (X1) menunjukkan nilai Cronbach Alpha 0.652, transparansi (X2) 0.801, pengawasan (X3) 0.691 dan pengelolaan keuangan daerah (Y) 0.844. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan bila nilai Cronbach Alpha > 0.60, maka instrumen dikatakan reliabel, sehingga konstruk pernyataan yang merupakan dari setiap variabel adalah reliabel.

Uji Normalitas

Sebagai salah satu uji asumsi klasik, normalitas data residual dalam model regresi perlu dikaji untuk memastikan pola distribusinya mengikuti distribusi normal. Untuk keperluan tersebut, peneliti menerapkan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dalam menganalisis data.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80693207
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan temuan pengujian tabel 9 di atas nilai Asymp signifikansi 2 tailed (0.083) > 0.05, berdasarkan pengambilan keputusan nilai signifikansi > 0.05, maka nilai residual berdistribusi normal. Maka keputusan tersebut dapat dinyatakan data berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas ini memiliki tujuan menilai tingkat korelasi antara variabel independen model regresi. Pada pengujian tersebut memberikan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) untuk menilai multikolinearitas.

Tabel 10. Hasil Uji Multikoleniaritas

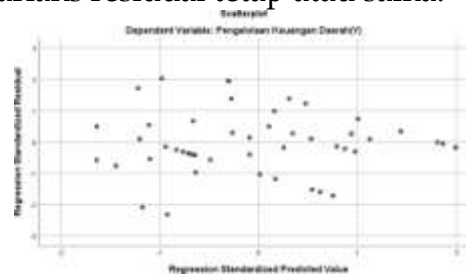
Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	2.617	3.156		.829	.411		
Akuntabilitas(X1)	.112	.158	.087	.708	.482	.680	1.470
Transparansi(X2)	.318	.102	.345	3.116	.003	.837	1.195
Pengawasan(X3)	.478	.133	.435	3.599	.001	.705	1.419

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah(Y)

Pada temuan analisis tabel 10 di atas nilai tolerance X1 (0.680), X2 (0.837) dan X3 (0.705) > 0.100 sedangkan nilai VIF X1 (1.470), X2 (1.195) dan X3 (1.419) < 10,00 ditarik kesimpulan tidak terjadi gejala multikolieritas pada variabel independen pada penelitian ini.

Uji Heterokedestisitas

Tujuan dari pengujian ini untuk memverifikasi apakah varians residual dalam model regresi tetap konstan pada rentang nilai variabel independen. Salah satu asumsi di mana varians residual tetap atau sama.



Gambar 2 Uji heteroskedastisitas

Hasil analisis grafik di atas menunjukkan tidak ditemukan pola jelas, yakni pola tertentu atau gambaran titik-titik sekitaran atas/bawah angka 0 pada sumbu Y dan titik-titik tidak menunjukkan pola mengerucut (menyempit), berpola bergelombang, ataupun pola linier yang mengindikasikan terjadinya heterokedastisitas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 11. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.617	3.156		.829	.411
Akuntabilitas(X1)	.112	.158	.087	.708	.482
Transparansi(X2)	.318	.102	.345	3.116	.003
Pengawasan(X3)	.478	.133	.435	3.599	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah(Y)

Pada tabel 10 di atas, didapatkan hasil sebagai berikut :

$$Y = 2.617 + 0.112X_1 + 0.318X_2 + 0.478X_3 + e$$

Penjabaran hasil persamaan sebagai berikut:

- a. Konstanta
 Nilai konstanta bernilai 2.617, menjelaskan ketika variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan pengawasan (X3) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pengelolaan keuangan daerah (Y) tetap sebesar 2.617. Dapat disimpulkan tanpa kontribusi dari variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan, pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada angka tersebut.
- b. Koefisien Akuntabilitas
 Variabel X1 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,112. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap penambahan satu poin pada nilai akuntabilitas diprediksi mendorong kenaikan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,112 poin.
- c. Koefisien Transparansi
 Variabel X2, ditemukan nilai koefisien regresi positif dengan nilai b = 0.318, secara statistik ini bermakna bahwa peningkatan satu poin pada aspek transparansi akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan variabel Y sebesar 0.318
- d. Koefisien Pengawasan
 Koefisien regresi pengawasan (X3) ditemukan nilai positif 0.478. hal ini bermakna bahwa peningkatan satu poin pada aspek pengawasan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan variabel Y 0.478.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 12. Hasil Uji Parsial

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.617	3.156		.829	.411
	Akuntabilitas(X1)	.112	.158	.087	.708	.482
	Transparansi(X2)	.318	.102	.345	3.116	.003
	Pengawasan(X3)	.478	.133	.435	3.599	.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah(Y)

1. Pengujian terhadap variabel akuntabilitas menghasilkan nilai (0.708) < ttabel (2.008) dan sig (0.482) > 0.05, dari temuan ini ditemukan Akuntabilitas tidak memberikan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Daerah pada pemerintahan Kota Manado. H1 ditolak dan H0 diterima.
2. Pengujian terhadap variabel transparansi menghasilkan nilai thitung (3.116) > ttabel (2.008) dan sig (0.003) < 0.05, maka disimpulkan Transparansi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Daerah pada pemerintahan Kota Manado. H2 diterima dan H0 ditolak.
3. Pengujian terhadap variabel pengawasan menghasilkan nilai thitung (3.599) > ttabel (2.008) dan sig (0.001) < 0.05, dari temuan ini disimpulkan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan

keuangan Daerah pada pemerintahan Kota Manado. H3 diterima dan H0 ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	160.235	3	53.412	15.450	.000 ^b
Residual	176.310	51	3.457		
Total	336.545	54			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah(Y)
b. Predictors: (Constant), Pengawasan(X3), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)

Hasil pengujian secara simultan menjelaskan bahwa diperoleh nilai Fhitung (15.450) > ftabel (3.179) dan sig (0.00) < 0.05, ditarik kesimpulan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel X1,X2, dan X3 secara simultan terhadap Y sehingga H4 diterima dan H0 ditolak.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.445	1.859

a. Predictors: (Constant), Pengawasan(X3), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)

Hasil analisis tabel 14 di atas, ditemukan persentase keragaman variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Pengawasan (X3) adalah 44,5% sedangkan 55.5% sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah maka dapat dilakukan pembahasan atau analisis antara kesesuaian teori dengan praktik yaitu sebagai berikut:

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah

Hasil penelitian secara statistik menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Manado. Hal ini terlihat dari nilai thitung sebesar 0.708 yang lebih kecil dari ttabel 2.008, serta nilai signifikansi 0.482 yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ditolak. Temuan ini bertentangan dengan ekspektasi teoretis yang mendasari penelitian ini, namun memberikan insight penting mengenai dinamika implementasi tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Tidak berpengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat diinterpretasikan dari beberapa perspektif yang saling melengkapi. Pertama, kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme akuntabilitas yang berjalan di instansi pemerintah Kota Manado cenderung bersifat prosedural dan administratif, yakni berfokus pada pemenuhan kewajiban pelaporan formal tanpa diimbangi dengan evaluasi kinerja yang

substantif. Praktik akuntabilitas ini sejalan dengan temuan Yandri Yanto dkk (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan seringkali hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif tanpa benar-benar menjadi instrumen peningkatan kinerja. Dengan kata lain, meskipun para responden mempersepsikan akuntabilitas sudah cukup baik, implementasi di lapangan belum mampu menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, berdasarkan perspektif teori keagenan (agency theory), akuntabilitas seharusnya berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani kepentingan principal (masyarakat) dan agent (pemerintah daerah). Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme akuntabilitas yang berjalan belum mampu meminimalkan moral hazard maupun asymmetric information secara efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang berbasis hasil, kurangnya integrasi antara sistem akuntabilitas dengan sistem perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara implementasi formal akuntabilitas dengan dampak substantif yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah

Berbeda dengan temuan pada variabel akuntabilitas, penelitian ini menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan melalui nilai *t*-hitung sebesar 3.116 yang lebih tinggi dari *t*-tabel 2.008 serta nilai signifikansi 0.003 yang berada di bawah batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam penyajian informasi anggaran, realisasi pendapatan, serta proses perencanaan dan pelaksanaan program, semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan. Pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat diinterpretasikan melalui beberapa mekanisme kausal. Pertama, transparansi berfungsi sebagai mekanisme yang mampu mengurangi asymmetric information antara agent (pemerintah) dan principal (masyarakat). Ketika informasi keuangan disampaikan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses, maka ruang bagi agent untuk melakukan tindakan oportunistik menjadi semakin sempit. Kondisi ini selaras dengan prinsip dasar teori keagenan yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent.

Kedua, transparansi meningkatkan kapasitas publik dan lembaga pengawas untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan tersedianya informasi yang memadai, masyarakat dan lembaga pengawas dapat lebih mudah mengidentifikasi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menciptakan efek jera (deterrent effect) yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fredo (2021) dan

Yandri (2024) yang menyatakan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kualitas penganggaran, pelaporan keuangan, dan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah. Ketiga, transparansi juga berkaitan erat dengan temuan latar belakang mengenai pengelolaan pajak yang tidak tertib. Dengan adanya transparansi dalam pengumpulan dan pelaporan pendapatan, masyarakat dapat memantau bagaimana pajak yang mereka bayarkan dikelola dan digunakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, bahkan menjadi variabel yang paling dominan dibandingkan variabel independen lainnya. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 3.599 yang lebih tinggi dari t tabel 2.008 dengan nilai signifikansi 0.001 yang jauh berada di bawah batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah diterima. Pengawasan yang efektif mampu memperkuat efektivitas tata kelola dan menekan peluang penyimpangan anggaran melalui mekanisme monitoring yang komprehensif. Dominasi variabel pengawasan dalam mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dapat diinterpretasikan melalui beberapa perspektif. Pertama, pengawasan berfungsi sebagai sistem kontrol yang memastikan bahwa semua kebijakan dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks teori keagenan, pengawasan merupakan mekanisme monitoring yang krusial untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai kepentingan principal. Pengawasan yang kuat membuat setiap tindakan pemerintah dapat dipantau, dievaluasi, dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua, temuan ini konsisten dengan latar belakang penelitian yang mengutip hasil penelitian Amin et al. (2022) yang menemukan bahwa pengawasan merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan kinerja anggaran di Provinsi Sulawesi Barat. Keberhasilan pengawasan dalam konteks Pemerintah Kota Manado dapat dilihat dari peran aktif Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh BPK dan DPRD. Meskipun ditemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagaimana tercermin dalam temuan BPK, mekanisme pengawasan yang ada tetap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, pengawasan yang efektif juga berkaitan dengan temuan latar belakang mengenai pengelolaan PD Pasar yang tidak optimal. Pengawasan yang komprehensif terhadap perusahaan daerah dapat memastikan bahwa investasi pemerintah memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara Simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji F (ANOVA), diketahui bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung (15.450) yang lebih besar dari Ftabel (3.179) dan nilai signifikansi uji F (0.000) yang berada di bawah batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah diterima. Pengaruh simultan yang signifikan dari ketiga variabel independen terhadap pengelolaan keuangan daerah memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dicapai melalui satu faktor saja, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Kedua, meskipun secara parsial akuntabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan, hal ini tidak berarti bahwa akuntabilitas tidak penting. Ketika dianalisis secara bersama-sama dengan transparansi dan pengawasan, ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya efek sinergis antara ketiga variabel, di mana transparansi dan pengawasan dapat memperkuat dampak akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.445 atau 44.5% menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun angka ini menunjukkan pengaruh yang cukup kuat, terdapat 55.5% variasi lainnya yang dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian. Hal ini selaras dengan perspektif teori keagenan yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, kualitas sistem informasi keuangan, dan partisipasi masyarakat.

Pembahasan Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi sebesar 0.445 atau 44.5% yang menunjukkan variasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sebagai variabel independen. Sedangkan, sisanya sebesar 55.5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan perspektif teori agency, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, kualitas sistem informasi keuangan, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun mekanisme tata kelola sudah diterapkan, masih diperlukan dukungan dari faktor internal dan eksternal lainnya agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada penelitian mengenai akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Manado, maka didapat kesimpulan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Manado.
2. Variabel transparansi terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Manado.
3. Pengawasan juga ditemukan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Manado, bahkan menjadi variabel yang paling dominan dibandingkan variabel independen lainnya.
4. Secara simultan, keseluruhan variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Manado.
5. Koefisien determinasi (R^2) bernilai 0,445 atau 44,5% menunjukkan bahwa variasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat di pengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Sementara itu, sisanya sebesar 55,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar penelitian ini, yakni kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, kualitas sistem informasi keuangan, dan partisipasi masyarakat.

Tingkatkan efektivitas akuntabilitas dengan mengutamakan akuntabilitas substantif yang berorientasi pada evaluasi kinerja dan capaian program, bukan hanya laporan administratif. Perkuat transparansi melalui penyediaan akses informasi publik yang lebih luas, memaksimalkan platform digital untuk publikasi anggaran dan realisasi secara real-time, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran, guna meningkatkan akuntabilitas publik dan meminimalkan asymmetric information. Optimalkan pengawasan sebagai variabel dominan dengan meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), memperkuat peran BPK dan DPRD melalui audit rutin, serta menerapkan pengawasan berbasis risiko.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian mendatang di sarankan menambahkan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi keuangan, politik dan kepemimpinan, karena variabel tersebut berpotensi memberikan kontribusi signifikansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, menggunakan metode kualitatif seperti wawancara atau observasi dianjurkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai mekanisme tata kelola keuangan daerah. Pendekatan kualitatif dapat membantu mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak tertangkap melalui survei, seperti praktik-praktik aktual akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan di lapangan, serta faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan instansi publik. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562–573.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. (2024). Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023. Diperoleh dari <https://manadokota.go.id/panel/uploads/file/document1724719264.pdf>.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). Laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Jakarta: BPK RI.
- Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political preference. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581>.
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>.
- Gultom, L. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat). *Elektriase: Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro*, 14(01), 132–144. <https://doi.org/10.47709/elektriase.v14i01.4552>.
- Haerani, S., Parmitasari, R. D. A., Aponno, E. H., & Aunalal, Z. I. (2019). Moderating effects of age on personality, driving behavior towards driving outcomes. *International Journal of Human Rights in Healthcare*. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0040>.
- Hahnussa, S. J. (2019). Akuntansi sektor publik. UWAIS Inspirasi Indonesia Halim, A. (2022). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2022). Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi dalam pemerintah daerah (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Karso, A. J. (2022). Good governance. Yogyakarta: Samudra Biru.
- LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Jakarta: LAN dan BPKP.
- LAN RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia). (2020). Pedoman good governance dalam tata kelola pemerintahan daerah. Jakarta: LAN RI.
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young: Evidence and implications. *National Bureau of Economic Research*, 358–380. Retrieved from <https://www.nber.org/papers/w15352.pdf>.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik: Akuntansi untuk pemerintahan pusat dan daerah (edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Oktari, N., et al. (2024). Akuntabilitas dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Keuangan Daerah*, 12(1), 10–25.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.